

### III. KERANGKA PEMIKIRAN

#### 3.1 Kerangka Pemikiran

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan aturan pokok dalam pembangunan suatu daerah. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berperan penting dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah. Menurut Dien (2014), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan alat penting yang dijadikan untuk mengarahkan pengembangan kawasan agropolitan agar pelaksanaan pengembangan ruang terpadu dan sistematis. Oleh karena itu, pengembangan kawasan agropolitan merupakan bagian dari pengembangan wilayah yang tidak lepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sama halnya dengan program pengembangan perdesaan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kanigoro, pengembangan kawasan agropolitan Kecamatan Kanigoro juga tidak lepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar yang telah disepakati bersama dan di dukung dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Blitar tahun 2006-2011 dan tahun 2011-2016 serta *master plan* Kawasan Agropolitan.

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif solusi dalam pengembangan wilayah perdesaan. Proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan telah menimbulkan berbagai masalah. Hal ini ditandai dengan munculnya ketimpangan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan antar kawasan perkotaan dan perdesaan ini dikarenakan kawasan perkotaan cenderung berpusat sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi sedangkan kawasan perdesaan sebagai pusat kegiatan pertanian yang tertinggal. Oleh karena itu, melalui pengembangan kawasan agropolitan diharapkan terjadi interkasi hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, yang digambarkan melalui adanya pusat pertumbuhan kawasan agropolitan atau kota tani dengan desa-desa sentra produksi pertanian atau *hinterland*.

Menurut Mahi (2014) suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi kawasan agropolitan apabila memiliki potensi komoditas unggulan, sarana dan prasarana sosial, ekonomi, pemerintahan, dan kemudahan aksesibilitas antar kawasan.

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang memadai dan memiliki daya dukung untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis seperti pasar, lembaga keuangan, ketersediaan jalan, pengairan, listrik dan transportasi untuk mendukung potensi pengembangan kawasan agropolitan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki suatu wilayah maka semakin berpotensi pula wilayah tersebut untuk mewujudkan pemertaan pembangunan (Nainggolan, 2011).

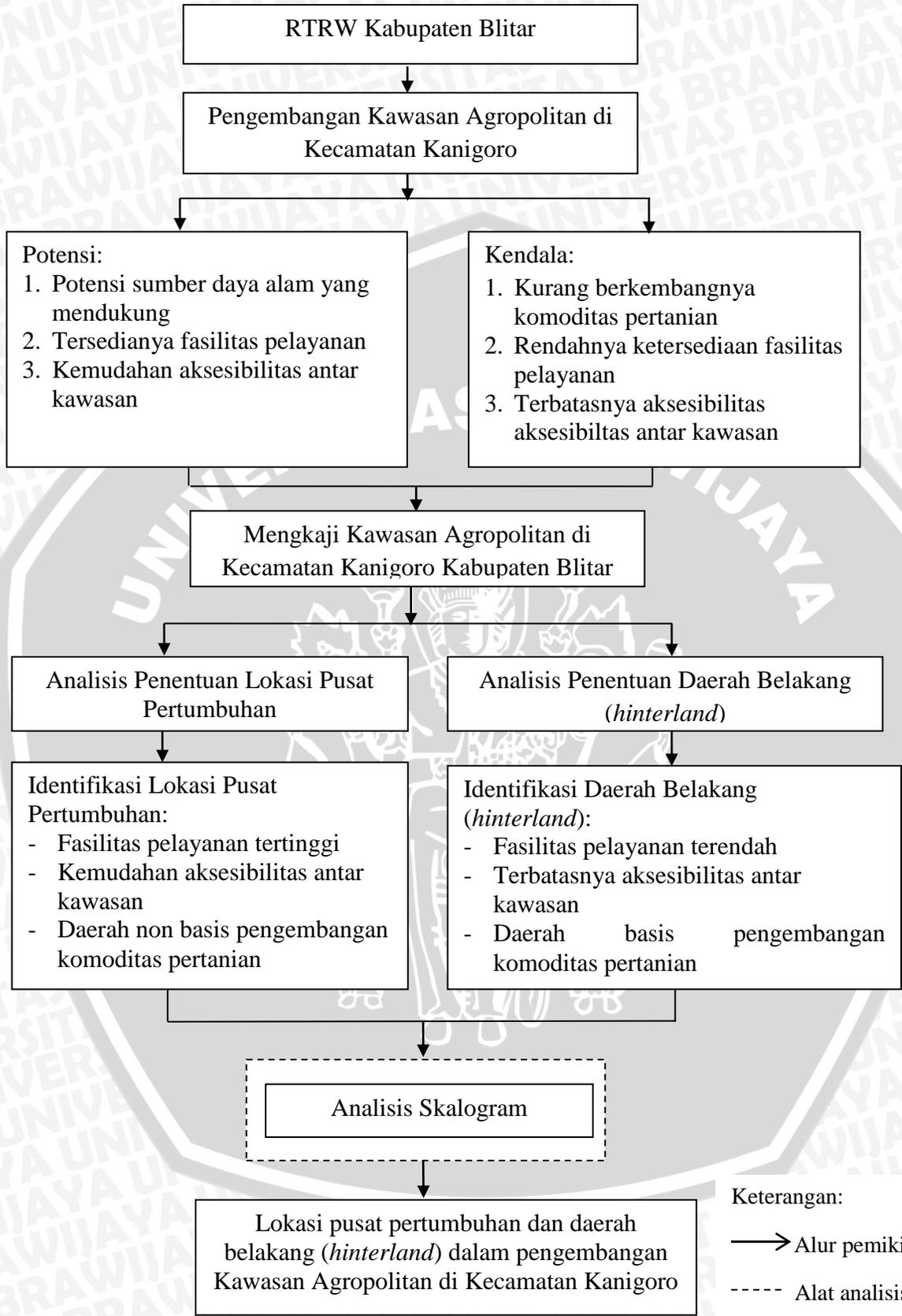
Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah yang mencanangkan Program Kawasan Agropolitan dengan Kecamatan Kanigoro sebagai sentra Kawasan Agropolitan. Penetapan Kecamatan Kanigoro sebagai Kawasan Agropolitan didasarkan potensi yang dimilikinya. Salah satunya adalah adanya potensi ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kanigoro masih belum optimal dan menyeluruh. Hal tersebut ditunjukkan masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan pemerintahan serta rendahnya aksesibilitas antar kawasan yang mengakibatkan pada sebagian kawasan Kecamatan Kanigoro untuk melayani kebutuhan masyarakatnya sehingga belum memberikan efek yang menguntungkan untuk daerah belakangnya (*hinterland*).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji ketersediaan sarana dan prasarana Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kanigoro untuk menentukan lokasi atau daerah yang menjadi pusat pertumbuhan dan daerah belakangnya (*hinterland*). Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut yakni sarana sosial (seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan dan rekreasi), sarana ekonomi (seperti pasar, kios pasar, warung makan, toko-toko, lembaga keuangan dan industri pertanian), sarana umum (telekomunikasi dan air bersih), sarana pemerintahan (seperti kantor kepala desa, kesos, trantib dan linmas), aksesibilitas antar kawasan (seperti transportasi dan ketersediaan jalan) dan daerah non basis pengembangan komoditas pertanian.

Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut diidentifikasi pada seluruh desa atau kelurahan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro dengan menggunakan analisis

Skalogram. Selanjutnya, hasil perhitungan analisis skalogram akan menentukan daerah yang menjadi pusat pertumbuhan dan daerah yang menjadi daerah belakang (*hinterland*) di Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kanigoro berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun alur kerangka pemikiran yang sistematis seperti berikut:





Keterangan:  
 —→ Alur pemikiran  
 - - - - Alat analisis

Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran

### 3.2 Hipotesis

1. Lokasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dalam pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro adalah Kelurahan Kanigoro. Pusat pertumbuhan pendukung lainnya adalah Desa Gaprang, Kelurahan Satreyan, Desa Sawentar, Desa Tlogo dan Desa Karangsono.
2. Lokasi yang ditetapkan menjadi daerah belakang (*hinterland*) dan sebagai sentra produksi pertanian di Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro adalah Desa Papungan, Desa Banggle, Desa Jatinom, Desa Gogodeso, Desa Kuningan dan Desa Minggirsari.

### 3.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis daerah yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan dan daerah belakang (*hinterland*) di Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar melalui identifikasi ketersediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas antar kawasan, serta daerah non basis komoditas pertanian yang ada pada masing-masing desa/kelurahan.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana sosial (seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan dan rekreasi), sarana ekonomi (seperti pasar, kios pasar, warung makan, toko-toko, lembaga keuangan dan industri pertanian), sarana umum (seperti telekomunikasi, jaringan listrik dan air bersih), pemerintahan (seperti kantor kepala desa, kesos, trantib dan linmas) dan aksesibilitas antar kawasan (seperti transportasi dan ketersediaan jalan) dan daerah non basis komoditas pertanian baik tanaman pangan dan hortikultura.
3. Data sarana dan prasarana yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi data BPS Kabupaten Blitar dan Kecamatan Kanigoro, BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kecamatan Kanigoro, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Cipta Karya tahun 2014 yang datanya tersedia lengkap dan sesuai dengan kondisi lapang.

### 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hirarki adalah tingkatan wilayah berdasarkan jumlah penduduk dan fasilitas pelayanan (peringkat).
2. Hirarki I merupakan pusat pertumbuhan utama (kota tani) yang tempat pemusatan penduduk terbesar, kelengkapan fasilitas dan memiliki potensi aksesibilitas terbaik (desa).
3. Hirarki II merupakan pusat distrik agropolitan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan wilayah seperti pasar grosir, pusat kegiatan agroindustri, produk pertanian jadi dan setengah jadi, pusat kegiatan agribisnis serta pusat pelayanan agroindustri khusus, pendidikan, pelatihan dan pemuliaan tanaman unggulan (desa).
4. Hirarki III merupakan kawasan pertanian atau *hinterland* yang perkembangannya lambat dan menjadi pemasok bahan baku untuk wilayah pusat pertumbuhan.
5. Jumlah pasar adalah jumlah pasar sebagai tempat memasarkan hasil pertanian, saprotan dan jasa pelayanan lainnya yang ada di setiap desa (unit).
6. Jumlah toko adalah jumlah tempat perdagangan kebutuhan sehari-hari toko kelontong, kios pasar dan warung yang ada di setiap desa (unit).
7. Jumlah lembaga keuangan adalah jumlah lembaga permodalan dan keuangan bagi pelaku usaha dan petani baik perbankan maupun non perbankan yang ada di setiap desa (unit).
8. Jumlah jaringan komunikasi adalah jumlah sarana komunikasi yang digunakan oleh penduduk baik SST umum maupun pribadi di setiap desa (unit).
9. Jumlah pengguna air bersih adalah jumlah KK yang menggunakan air bersih yang sumbernya dari PDAM/ledeng, pompa umum atau sumur bor di setiap desa.
10. Jumlah pengguna jaringan listrik adalah jumlah KK yang menggunakan jaringan listrik baik PLN maupun non PLN.

11. Jumlah sarana dan prasarana transportasi adalah jumlah sarana transportasi yang digunakan penduduk di setiap desa (unit).
12. Jumlah sarana pendidikan adalah jumlah sekolah SD/MI negeri dan swasta, SLTP/MTs negeri dan swasta, SMA/MA negeri dan swasta, Perguruan Tinggi dan diniyah (pesantren) yang ada di setiap desa (unit).
13. Jumlah sarana kesehatan adalah jumlah pelayanan kesehatan antara lain jumlah RS (Rumah Sakit), rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas pembantu, praktek dokter, praktek bidan, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), apotek dan toko obat di setiap desa (unit).
14. Jumlah sarana peribadatan adalah jumlah masjid, mushola, pondok pesantren, gereja, wihara dan pura/sanggar yang ada di setiap desa (unit).
15. Jumlah sarana rekreasi adalah jumlah candid an arca yang ada di setiap desa (unit).
16. Jumlah industri pengolahan hasil pertanian adalah jumlah industri pengolahan produk hasil pertanian baik industri kecil sedang maupun besar yang ada di setiap desa (unit).
17. Jumlah sarana pemerintahan adalah jumlah pelayanan pemerintahan antara lain kantor kepala desa (kades), kantor ketertiban dan keamanan (trantib), kantor kesejahteraan sosial (kesos) dan kantor perlindungan masyarakat (linmas)
18. Aksesibilitas antar kawasan adalah jumlah sarana transportasi dalam menghubungkan desa satu dengan desa lainnya (unit).